

Nama : Wina Nadia Maratama

NPM : 2313031070

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Pertemuan 11

SOAL KASUS

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *performance-based budgeting*
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

TUGAS ANDA

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1) Analisis Struktur Pengeluaran

a. Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Jawab:

- a. Struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya masih belum bisa dianggap efisien karena alokasi anggarannya tidak sepenuhnya mendukung peningkatan mutu hasil belajar dengan cara yang maksimal. Sebesar 68% yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pengajar terbilang sangat tinggi, sehingga anggaran untuk program peningkatan kualitas pembelajaran menjadi terbatas. Dalam konteks ekonomi pendidikan, pengeluaran yang terlalu tinggi untuk komponen pegawai cenderung tidak secara langsung memperbaiki hasil pendidikan seperti kemampuan membaca dan berhitung. Hal ini terlihat dari prestasi siswa yang masih di bawah rata-rata nasional meskipun dana untuk pendidikan cukup besar.

Di samping itu, efisiensi juga terganggu oleh ketidakmerataan distribusi tenaga pengajar. Sekolah di kawasan perkotaan menghadapi kelebihan guru, sementara lokasi terpencil mengalami kekurangan tenaga pengajar. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum berjalan sesuai target. Dengan kata lain, masalah utama bukanlah kurangnya dana, melainkan pada cara pengalokasiannya yang belum maksimal.

b. Bagian mana yang perlu direalokasi dan mengapa?

Jawab:

- b. Realokasi dana diperlukan untuk memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Pengeluaran untuk pegawai harus diawasi, bukan dengan pemotongan yang ekstrem, melainkan melalui strategi penempatan guru yang lebih seimbang. Tindakan ini krusial karena kelebihan jumlah guru di suatu area tidak memberikan manfaat, sementara kekurangan di area lain justru menghalangi proses pembelajaran.

Berikutnya, anggaran untuk peningkatan mutu guru harus ditambah, terutama dalam pelatihan yang berfokus pada praktik mengajar dan pendampingan di ruang kelas. Ini sangat penting karena kualitas pengajaran berdampak langsung pada pencapaian belajar siswa. Sarana

pendidikan, terutama dalam hal digitalisasi, juga memerlukan alokasi yang lebih besar karena kurangnya akses teknologi merupakan salah satu faktor penyebab disparitas kualitas pendidikan. Selain itu, program dukungan untuk siswa perlu diperluas dan diarahkan dengan lebih tepat agar dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu.

2) Analisis Sumber Pembiayaan

- a. Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Jawab:

- a. Pembiayaan untuk pendidikan di Nusantara Raya saat ini masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah daerah. Ketergantungan ini menghasilkan ruang fiskal yang terbatas dan kaku, terutama saat kebutuhan pembiayaan meningkat, seperti untuk digitalisasi sekolah dan pemerataan mutu pendidikan. Jika hanya bergantung pada APBD, inovasi serta percepatan dalam pembangunan sektor pendidikan akan sulit terwujud.
- b. Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Jawab:

- b. Keterlibatan sektor swasta serta penggunaan skema pembiayaan alternatif mutlak diperlukan untuk memperkuat kapasitas pendanaan pendidikan. Salah satu model yang tepat adalah Kemitraan Publik Swasta, di mana pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta dalam menyediakan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Dalam kerangka ini, pihak swasta dapat melakukan investasi awal untuk perangkat digital dan konektivitas internet, sementara pemerintah berperan dalam regulasi dan pengawasan.

Model lain yang relevan adalah pembiayaan berdasarkan hasil, yaitu dana yang dihubungkan dengan pencapaian kinerja tertentu seperti peningkatan tingkat literasi atau pengurangan angka putus sekolah. Model ini mendorong efisiensi karena setiap pengeluaran anggaran harus memberikan dampak yang dapat diukur. Selain itu, skema dana pencocokan juga dapat diterapkan, di mana pemerintah mencocokkan dana yang diterima dari pihak swasta atau filantropi untuk program pendidikan spesifik. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan juga bisa diarahkan dengan lebih terencana untuk

mendukung pemerataan pendidikan. Dengan berbagai model ini, pembiayaan menjadi lebih bervariasi, fleksibel, dan berkelanjutan.

3) Perbandingan dengan Negara OECD

- a. Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Jawab:

- a. Beberapa praktik dari negara-negara OECD yang realistis untuk diimplementasikan di Nusantara Raya meliputi penganggaran yang didasarkan pada kinerja, distribusi dana sesuai dengan kebutuhan siswa, serta sistem evaluasi yang menggunakan data. Penganggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian dana untuk terhubung langsung dengan hasil yang diinginkan, sehingga penggunaan dana menjadi lebih efisien. Pendekatan alokasi berdasarkan kebutuhan siswa membantu memastikan bahwa wilayah yang mengalami keterbatasan menerima dukungan yang lebih besar. Di sisi lain, sistem evaluasi yang menggunakan data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

- b. Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawab:

- b. Penerapan praktik ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Kualitas serta ketersediaan data pendidikan masih tidak merata, terutama di wilayah terpencil, yang menyulitkan kebijakan berbasis data untuk diterapkan. Di sisi lain, kemampuan manajemen di tingkat sekolah dan pemerintah daerah sangat bervariasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kemampuan dalam mengelola anggaran dan program. Tantangan lainnya adalah adanya kemungkinan penolakan dari pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh perubahan, terutama mengenai redistribusi guru dan penyesuaian sistem insentif. Sehingga, pelaksanaan harus dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan sistem dan kapasitas sumber daya manusia.

4) Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru

- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

Jawab:

Transformasi dalam pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara bertahap, terarah, dan berdasarkan data untuk mencapai hasil yang konkret. Agenda utama mencakup efisiensi dalam penggunaan anggaran, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan mutu pembelajaran bagi siswa.

Tahun ke 1–2	Penekanan ditaruh pada penataan penyebaran guru serta penguatan sistem informasi pendidikan. Pemerintah akan melakukan pemetaan sumber daya pengajar dengan cermat, mengidentifikasi sekolah yang mengalami surplus atau kekurangan tenaga pendidik, serta memulai proses redistribusi. Di fase ini, juga akan dibangun basis data pendidikan yang akurat yang berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Tahun ke 2–3	Memulai implementasi anggaran yang berbasis capaian kinerja secara bertahap. Penetapan dana tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan administratif, tetapi juga memperhitungkan hasil dari belajar siswa. Di tahap ini, pelatihan bagi guru akan ditingkatkan dengan menekankan pada metode pengajaran yang efektif dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.
Tahun ke 3–4	Penekanan pada peningkatan digitalisasi di sekolah. Pemerintah akan meningkatkan akses internet, memberikan perangkat pembelajaran yang diperlukan, dan mulai menerapkan platform pembelajaran secara digital. Selain itu, sistem data pendidikan juga akan mulai diintegrasikan untuk memudahkan pemantauan secara langsung.
Tahun ke 4–5	Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang berasaskan data. Penilaian terhadap kinerja sekolah dan pengajar akan dilakukan dengan cara yang lebih objektif melalui indikator yang terukur. Hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan perbaikan dalam kebijakan dan penempatan anggaran di tahun yang akan datang.

- Perubahan Struktur Belanja

- Mengatur pengeluaran untuk pegawai melalui redistribusi guru agar lebih seimbang
- Mengalihkan sebagian anggaran ke program yang memberi dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran

- Meningkatkan dana untuk pelatihan guru, pengembangan infrastruktur digital, dan bantuan kepada siswa yang berbasis kebutuhan.

- Strategi Peningkatan Kualitas Guru

- Program pelatihan yang berkelanjutan dan fokus pada pengalaman mengajar di dalam kelas
- Inisiatif peningkatan kemampuan seperti pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan
- Pemberian penghargaan khusus bagi para guru yang mengajar di lokasi-lokasi terpencil
- Implementasi penilaian kinerja yang didasarkan pada kemajuan hasil belajar siswa

- Digitalisasi Sekolah

- Menjamin ketersediaan akses internet yang merata di seluruh sekolah
- Pembelian alat pembelajaran yang berbasis teknologi modern
- Pemanfaatan platform pembelajaran digital untuk mendukung aktivitas belajar-mengajar
- Pengembangan sistem data pendidikan yang saling terhubung

- Monitoring dan Evaluasi

- Memanfaatkan indikator yang berbasis data seperti tingkat literasi, numerasi, dan perkembangan siswa
- Menerapkan evaluasi yang berbasis nilai tambah pendidikan untuk mengukur kemajuan yang nyata
- Meningkatkan tingkat transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan